

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan kajian dari studi kasus pembelajaran PPKn pada era otonomi daerah di SMUN 1 Garut, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

PPKn merupakan salah satu bagian dari PIPS, maka pembelajaran PPKn selalu terkait dengan 3 tradisi pengajaran IPS, yakni 1) IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan (*Citizenship Transmission*), 2) IPS sebagai pengajaran ilmu-ilmu sosial (*Sosial Studies Thought as Sosial Science*), dan 3) IPS sebagai penyelidikan reflektif (*Sosial Studies Thought as Reflective Inquiry*). Ketiga tradisi pengajaran IPS tersebut akan membekali anak didik selain memiliki kemampuan menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur PPKn, juga memiliki keterampilan sosial sebagai interpretasi dari warga negara yang baik dan juga mampu berperan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. PPKn kental dengan pendidikan nilai, maka untuk menciptakan dan membentuk pada status warga Negara yang baik (*a good citizenship*).

Pada era otonomi daerah pembelajaran PPKn memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendidikan nilai dan sikap yang harus ditanamkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kewenangan yang lebih bersifat

desentralistik memungkinkan setiap daerah mampu mengembangkan kualitas sumberdaya manusianya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakatnya. Dengan pemberlakuan ini, guru harus memiliki jiwa profesional dalam mengorganisasikan pembelajaran yang sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat di daerah. Otonomi daerah merupakan sarana yang tepat untuk mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan PPKn yang memiliki tanggung jawab dan moral yang tinggi terhadap kemajuan daerahnya sendiri sehingga mampu bersaing dengan daerah lain, selain itu mampu menjadi pelopor terhadap semangat integritas kebangsaan secara utuh sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

2. Kesimpulan Khusus

Dalam bahasan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tentang pembelajaran PPKn pada Era Otonomi Daerah. Beberapa kesimpulan khusus tersebut antara lain :

- a. Secara sosiografi SMU 1 Garut letaknya cukup strategis berada di pusat kota Garut didukung oleh jalur transportasi angkutan kota yang memudahkan siswa menuju lokasi sekolah. Dengan lokasi demikian, maka siswa SMU 1 Garut dilihat secara ekonomi cukup bervariasi mulai dari golongan menengah ke atas dari berbagai latar belakang pekerjaan orang tuanya mulai dari Petani, Buruh sampai PNS.
- b. Pemahaman guru terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa pada dasarnya otonomi daerah itu merupakan tuntutan yang terjadi dalam sistem yang berlaku pada saat pemerintahan orde baru, di mana sistem yang bersifat

sentralistik telah memasung sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya dengan aturan-aturan yang lebih otoritarianism. Dampak dari pemberlakuan sistem tersebut terbentuklah sistem baru yang bersifat desentralistik yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pada daerah untuk menentukan, mengelola dan mengatur potensi-potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat daerah.

- c. Pengelolaan pembelajaran IPS-PPKn yang meliputi kegiatan perencanaan, proses dan evaluasi telah berusaha diorganisasikan oleh guru-guru PPKn dengan berupaya disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah meskipun masih menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pada perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sementara ini kurikulum memang masih mengacu pada kurikulum 1994, sebab belum terdapatnya kurikulum yang merupakan instruksi dari lembaga atau dinas pendidikan yang mengisyaratkan kurikulum otonomi daerah. Selain itu tergambar pula pada pelaksanaan pembelajarannya masih cenderung *teacher centered* atau berpusat pada guru, hal ini merupakan salah satu indikator pembelajaran yang dikelolanya belum sepenuhnya menyentuh pola pembelajaran pada era otonomi daerah. Tetapi meskipun begitu guru-guru pada pelaksanaannya berupaya memasukan isu-isu otonomi daerah itu dalam kegiatan pembelajaran meskipun masih dirasakan susah dalam mengintegrasikannya. Pada tahap evaluasi pembelajaran, guru-guru dalam hal ini masih cenderung mengacu pada harapan yang tergambar dalam kurikulum 1994 yang masih berlaku

sampai sekarang, hanya saja guru-guru juga berusaha memasukan isu atau ide-ide otonomi daerah tersebut dalam evaluasi yang dilaksanakan.

- d. Kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di era otonomi daerah masih perlu dipertimbangkan, sebab pada dasarnya guru masih belum memahami secara riil pelaksanaan otonomi daerah dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun pada dasarnya guru telah memahami makna pemberlakuan otonomi daerah, namun berdasarkan aplikasinya dalam pembelajaran ternyata masih dirasakan kesulitan terutama dalam mengorganisasikan dan mengelola materi pembelajaran. Pembelajaran PPKn pada Era Otonomi Daerah tidak terlepas dari perencanaan yang matang dengan mengadopsi karakteristik pembelajaran dalam konteks otonomi daerah.
- e. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran PPKn pada era otonomi daerah antara lain meliputi sarana atau media belajar masih terbatas, fasilitas pembelajaran belum memadai, pengembangan materi masih harus mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga sulit mengorganisasikannya, alokasi waktu pembelajaran PPKn yang sangat terbatas baik kelas 1,2 maupun kelas 3, dan belum adanya rumusan konsep pembelajaran yang sistematis yang dibuat oleh lembaga atau dinas pendidikan sehingga sulit untuk diadopsi kedalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kendala-kendala ini selanjutnya menjadi bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait.
- f. Dampak pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kualitas pendidikan PPKn memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan pendidikan PPKn yang

melandaskan pada sistem nilai dan norma yang berlaku di daerah dalam hal ini Garut. Pendidikan PPKn akan lebih bermakna bila didasarkan pada pendidikan nilai dan norma yang berbasis nilai dan norma daerah yang sesuai dengan budaya dan karakteristik masyarakat Garut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Dinas Pendidikan

Dalam tataran Dinas pendidikan kabupaten Garut, seyogianya segera membentuk Team perumus kurikulum dengan mempertimbangkan setiap perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Ini ditujukan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan daerah atau kurikulum lokal yang mengadopsi kebutuhan lokal Garut. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada pihak sekolah, atau guru dan mensosialisasikan makna otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.

2. Untuk Pihak Sekolah

Pertama, dalam tataran sekolah, perlu dioptimalkan kemampuan Dewan Sekolah dalam mengadopsi lingkungan sekitar dalam Kurikulum Berbasis Sekolah apalagi menjelang Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Kedua*, Pengadaan fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang sesuai dengan semangat otonomi daerah perlu diupayakan dan segera diwujudkan agar

pembelajaran menjadi lebih berkualitas serta mampu menciptakan guru yang professional.

3. Untuk Pihak Guru

Perlu dioptimalkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran PPKn dalam kerangka otonomi daerah, serta guru lebih mampu mehamai makna pemberlakuan otonomi daerah dalam implikasinya terhadap pembelajaran di kelas. diantaranya dengan;

- a. menyesuaikan pembelajaran PPKn dengan sikap dan nilai budaya daerah
- b. menyesuaikan pembelajaran PPKn dengan minat siswa.
- c. menyesuaikan pembelajaran PPKn tujuan pembelajaran dengan
memasukan isu-isu otonomi daerah
- d. menyesuaikan pembelajaran PPKn motivasi dan kebiasaan daerah yang
ada di lingkungan siswa